

Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik

Apandi

Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Lampung, Indonesia

Corresponding email: apandi.ad@gmail.com

Abstract

E-literacy and education are important components in improving the quality of human resources needed in an organization. The purpose of this study is to reveal the importance of e-literacy and public policy education. The State Civil Apparatus (ASN) requires e-literacy and education to improve performance results so that public services can be maximized. This becomes an interesting research in the development of science based on the real events that occur in Indonesia. Where so far, e-literacy and education is only intended for the public, especially millennial generation. The research method used is the study of literature where data is obtained through various secondary sources that are relevant to theoretically strengthen research results. The findings explain that e-literacy and education are effective and efficient strategies in overcoming budget constraints and low levels of ASN competence. With e-literacy and public policy education, it is hoped that the professionalism of the ASN bureaucracy will increase and the quality of public services will be better.

Keywords: State Civil Apparatus, E-Literacy, Education, Public Policy

1. PENDAHULUAN

Pengembangan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal penyempurnaan peraturan bidang kepegawaian sebagaimana Peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Untuk menciptakan profesionalisme birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat maka melalui Pusat Pelatihan dan Pengembangan serta Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus mengupayakan tujuan tersebut dapat terwujud sebagaimana seharusnya. Namun, hal ini akan mengalami berbagai hambatan yang disebabkan oleh politisasi kepemimpinan, kriminalitas jabatan, rendahnya kompetensi ASN, dan budaya senioritas (Nurullah, 2019).” Oleh karena itu, sangat penting dalam hal ini adalah Pemerintah untuk mendorong pembangunan kompetensi ASN dan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas ditengah keterbatasan anggaran.

“Kondisi pertumbuhan rata-rata per tahun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 2010-2015 adalah sebesar 0,31%. Persentase PNS terhadap Angkatan Kerja sebesar 118,19 juta atau sekitar 3,89%. Jumlah PNS cukup besar jelas membawa kontribusi yang besar bagi pengembangan modal manusia, namun terbilang sebagian besar memiliki kinerja yang buruk. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB), hampir 30% atau sekitar 1,35 juta PNS memiliki kinerja yang tergolong belum maksimal, belum tahu tugas hingga belum memahami kewajibannya” (Hartono, 2019).

Urgensi yang dihadirkan dalam upaya pengembangan kompetensi ASN merupakan tantangan yang cukup pelik, namun bukan berarti tanpa ada jalan tengah untuk menyelesaikannya. Pemerintah mendorong para *stakeholder* untuk melakukan upaya yang dapat membantu meminimalisir hambatan dengan berbagai bentuk pelatihan yang terintegrasi. Intinya adalah pengembangan kompetensi ASN yang dilakukan dengan pelatihan tersebut harus dimbangi dengan penilaian yang terstandarisasi dan penguatan manajemen strategis. ASN juga tidak diperbolehkan untuk bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik, tetapi harus bersikap netral dan hal ini dilakukan untuk memastikan integritas, keterpaduan, dan persatuan negara (Sarnawa, 2018). Hal ini berarti dalam pelaksanaan tugas ASN dituntut untuk fokus baik pikiran maupun energi pada tanggungjawab yang telah diberikan.

Beberapa penelitian terdahulu menghubungkan antara kompetensi ASN dengan kinerja pada instansi pemerintah (Nasution, 2017; Suprpto, Pomalingo & Akib, 2018; Hadiana, 2019; Gani, Ghani & Nujum, 2019). Rendahnya kompetensi ASN dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal edukasi dan pelatihan (Dewi & Subiyanto, 2020). Selain itu, adanya kesenjangan hukum dapat berpengaruh terhadap proses pengisian posisi ASN (Sudrajat, et al, 2019). Hal ini akan berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memunculkan masalah baru. Oleh karena itu, berbagai upaya ditempuh melalui peningkatan sistem informasi sumber daya manusia, komitmen organisasi, mengembangkan karier dan disiplin kerja serta pelatihan Diklat. Penerapan model sistem pengukuran kinerja menggunakan Malcolm Baldrige model (B) juga digunakan mengukur kinerja untuk mendukung hukum ASN sebagaimana UU No. 5 Tahun 2014. Hasil temuan mengungkapkan tentang pentingnya peran kepemimpinan, perencanaan strategis, dan pelayanan publik dalam manajemen proses dan hasil kinerja organisasi (Dalimunte & Muda, 2014).

Dari peneliti terdahulu inilah, terungkap bahwa peran sumber daya manusia yang ahli dalam penggunaan teknologi informasi dan pentingnya edukasi kebijakan publik masih belum banyak diteliti. Padahal seharusnya dengane-literasi dan edukasi kebijakan publik dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. “Faktanya dua komponen ini menjadi sangat penting karena sejauh ini implementasi kinerja, talenta, dan penilaian kinerja belum mampu mewujudkan *Good Government Governance*, ini tercermin dari peran ASN dalam mengimplementasikan layanan publik yang masih menempatkan diri sebagai birokrat bukan sebagai pelayan publik.” (Nurwanda & Garis, 2019). Tepatnya bahwa implementasi e-literasi saat ini hanya

berfokus terhadap pelayanan kepada masyarakat melalui *information communication technology service obligaton universal* (ICT USO) sebagai instrumen kebijakan pemerintah. Sayangnya, instrumen e-literasi tidak dapat menyediakan nilai yang paling menguntungkan untuk masyarakat karena kurangnya sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Fitriani, 2015; Wilopo & Fitriani, 2016).

Manajemen e-learning dan edukasi kebijakan nampaknya akan menjadi elemen paling penting dari praktik kompetensi ASN. Akibatnya, investasi dalam rencana pendidikan tinggi yang baik adalah penting dalam upaya akselerasi pelayanan publik. Gagasan konseptual perencanaan strategis memainkan peran kunci keberhasilan dalam pengembangan proses e-learning dan edukasi kebijakan publik. E-government pada dasarnya memfokuskan diri pada pengelolaan informasi dalam birokrasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tentunya ini membutuhkan sebuah bentuk pertimbangan yang tepat. Untuk menghindari pemborosan anggaran dan ketepatan program keterampilan, pelatihan, dan pendidikan tambahan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetensi ASN.

Program e-literasi dan edukasi kebijakan publik terhadap ASN diharapkan berkorelasi positif dan dapat membantu mengatasi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik ditengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Terutama untuk mengatasi kesenjangan pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Instrumen ini merupakan salah satu langkah pengembangan kelembagaan untuk mendukung strategi modernisasi aparatur negara dan reformasi administrasi serta pelayanan sipil sebagaimana yang telah diterapkan di negara Rusia (Plaksin & Zhulin, 2009).

2. TINJAUAN TEORI

2.1. Kompetensi Diri

Pegawai atau individu yang berprestasi tentu akan mendatangkan keuntungan dan kemajuan bagi organisasi dimana individu tersebut bekerja. Sebaliknya, individu yang memiliki tingkat prestasi rendah dapat menjadi hambatan bagi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dibutuhkan (Cahyadi & Surati, 2019).

Salah satu manajemen strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui kompetensi. Lima komponen utama dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah: “1) Adanya motif yang konsisten dan diinginkan seseorang yang menyebabkan suatu tindakan yang positif; 2) Sifat atau karakteristik fisik dan respon positif terhadap berbagai situasi dan informasi yang diterima individu; 3) Konsep diri yang baik sebagai sikap atau citra yang melekat pada individu; 4) Pengetahuan yang bermanfaat yang diperoleh dari peran individu dalam lingkungan sosial dan dimiliki dalam spesifikasi atau bidang yang dikuasai; dan 5) Keahlian individu dalam mengerjakan dan melaksanakan tugas fisik” (Boyatzis, 2008).

Secara garis besar, kompetensi individu tidak lain adalah kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Alasannya sederhana, 1)

kompetensi dapat mendorong individu supaya melakukan kinerja yang maksimal, 2) Kompetensi memungkinkan individu untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan. Karena kemampuan bertahan dan keberlangsungan suatu organisasi adalah tergantung pada pemberdayaan sumber daya manusia yang dapat menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan masyarakat, dan 3) kualitas sumber daya manusia yang baik akan mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi.

2.2. Model E-literasi

Pemahaman literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya dan pengalaman (UNESCO, 2005). Dalam hal ini, empat prinsip utama untuk pengembangan literasi yaitu; 1) menerapkan prinsip berimbang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu yang berbeda satu dengan yang lain; 2) memiliki keahlian berbahasa yang baik dan kemampuan berpikir kritis; 3) mewajibkan program literasi diterapkan bagi seluruh individu; 4) menghargai adanya keberagaman budaya bangsa (Beers, Beers & Smith, 2009). Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip literasi adalah bukan hanya kemampuan secara fisik akan tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif serta edukasi mengenai kultur budaya organisasi.

“E-literasi adalah literasi komputer yang diintegrasikan bersama dengan literasi informasi, literasi moral, literasi media, dan keterampilan diri dalam belajar dan mengajar (Secker, 2004).” E-literasi sebagai keahlian dalam menggunakan perangkat teknologi sangat dibutuhkan bagi individu/organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi ditengah kemajuan teknologi. E-literasi terdiri dari; “1) Literasi media yaitu kemampuan memahami dan menggunakan komunikasi massa baik dalam mengakses, menganalisa, dan mengevaluasi media apapun secara efektif dan efisien (McCannon, Gleckler & Louchery, 2003); 2) literasi informasi yang digunakan untuk melatih individu dalam menggunakan informasi agar dapat mengaplikasi sumber daya untuk pekerjaannya dengan cara yang beretika (Behrens, 1994); 3) literasi ICT (Information and Communication Technologies) sebagai kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencapai tujuan (Martin, 2008).

E-literasi mempunyai tujuh element yang meliputi; “1) *Information literacy*, kemampuan mencari informasi secara efektif; 2) *Digital scholarship*, melakukan partisipasi aktif; 3) *Learning skills*, belajar secara efektif, 4) *ICT literacy*, menyesuaikan kebutuhan dengan perangkat digital dan layannya; 5) *Career and Identity management*, mengelola identitas online; 6) *Communication and collaboration*, partisipasi secara aktif melalui jaringan; dan 7) *Media literacy*, kemampuan kritis membaca dan kreatif dalam berkomunikasi (JISC, 2018).

2.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktik terarah yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan sebagai bentuk pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Easton, 1965; Lasswell & Kaplan, 1950; Dye,

1978; Anderson, 2014). Untuk itu, kebijakan publik membutuhkan analisis yang tepat untuk mengatasi masalah dan menjadi solusi yang kemungkinan besar dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui serangkaian proses penetapan agenda dan konsep yang jelas.

“Kebijakan publik merupakan pilar pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Kebijakan publik sejatinya mencerminkan partisipasi publik dan konsistensi pada penegakan hukum yang bersumber dari keteraturan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik membutuhkan perencanaan yang baik, benar dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada kebijakan makro yang membentuk jaringan dalam sebuah kolaborasi yang efektif” (Hayat, 2018).

Edukasi kebijakan akan mempengaruhi kualitas dari manajemen terhadap kinerja program. Hubungan ini berlaku bahkan di hadapan kontrol penentu keberhasilan program lainnya (Meier & O’Toole, 2002). Sebuah hubungan positif dibangun antara kinerja layanan dan edukasi kebijakan. Penting untuk memberikan perhatian pada penerapan program edukasi kebijakan bagi individu karena akan berdampak pada strategipenetapan dan manajemen atau kinerja organisasi itu sendiri (Boyne, 2004).

3. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan *Human Capital Proses* dimana ASN sebagai subjek sekaligus objek penelitian. Studi literatur digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mampu menguatkan hasil temuan. Lebih jauh, penulis bermaksud menjelaskan secara teoritis tentang tahapan yang dibutuhkan untuk meningkatkan e-literasi dan peran penting implementasi dari edukasi kebijakan publik bagi ASN. Point-point penting yang ditelaah berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu dimasukkan dalam pembahasan untuk memberikan kejelasan tujuan dari penelitian (Basrowi & Suwandi, 2008).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelaksana tugas pemerintah dan pembangunan dalam berbagai dimensi sosial ekonomi. Oleh sebab itu, ASN harus netral dan memiliki profesionalitas yang tinggi. Netralitas berarti harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua kelompok atau organisasi tertentu. Ini dapat diperoleh dari peningkatan e-literasi dan edukasi kebijakan publik yang tepat. Komponen tersebut sangat cocok untuk diimplementasikan dalam upaya peningkatan kompetensi ASN. Sebab, perkembangan teknologi saat ini menuntut kemampuan individu yang bukan hanya mengerti namun memahami tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan efektif dan efisien serta memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diberikan secara maksimal. Sedangkan edukasi akan membantu ASN memahami bahwa penting untuk tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Pemerintah mulai bergerak aktif dalam upaya meningkatkan kompetensi ASN. Bahkan saat ini, tuntutan untuk memiliki kompetensi unggul pada saat menjalankan

tugas dan fungsi di instansi pemerintah menjadi sesuatu yang wajib dimiliki setiap ASN. Tiga kompetensi utama yang harus dimiliki adalah, “1) Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; 2) kompetensi manajerial berupa penilaian terhadap tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan kompetensi sosial kultural berupa penilaian dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat seperti agama, suku, dan budaya masyarakat atau dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan” (KEMENPAN, 2018).

Pemerintah melakukan Penyelenggaraan Diklat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN. Tujuannya adalah agar ASN menjadi profesional dan berdaya saing dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun ini membutuhkan dukungan dari literasi dan edukasi. Pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran adalah contoh bagian dari peningkatan literasi dan edukasi dalam pengembangan kompetensi yang dilakukan pemerintah saat ini. Edukasi kebijakan publik akan mempengaruhi kualitas dari manajemen publik. Hubungan ini berlaku bahkan di hadapan kontrol penentu keberhasilan program pemerintah yang lainnya. Sebuah hubungan positif antara kinerja layanan dan edukasi kebijakan dapat terwujud dengan cara memberikan perhatian pada penerapan program edukasi kebijakan publik bagi ASN karena akan berdampak pada strategi manajemen publik dan hasil kinerja.

Masih banyak strategi lain yang dapat dilakukan melalui peningkatan e-literasi dan edukasi diantaranya; 1) pemerataan akses internet. Akses internet yang lambat akan mempengaruhi kinerja ASN. Terlebih lagi pada kondisi di wilayah yang sangat sulit terjangkau akses internet. Maka e-literasi menjadi tidak dapat maksimal. Edukasi kebijakan publik secara terbuka dan bersosialisasi dengan pendekatan yang lebih proaktif akan ASN memahami tentang pentingnya implikasi kebijakan publik yang menjadi tanggung jawab bersama; 2) Peran lembaga pendidikan dan sesama anggota ASN. Tidak dapat dipungkiri peran lembaga pendidikan tentunya dibutuhkan untuk pelatihan e-learning dan edukasi. Lembaga profesional akan mempengaruhi hasil dari kompetensi yang diselenggarakan. Lembaga ini akan diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana berdasarkan Pasal 30 UU ASN. Melalui dialog interaktif akan mempermudah dalam proses penyerapan informasi. Tentunya tidak ada hasil yang instan yang akan bertahan lama, oleh karena itu peran sesama anggota yang saling bahu membahu dalam berbagi pengetahuan akan sangat membantu dalam proses penyerapan e-literasi dan edukasi kebijakan publik; 3) proses memahami diri sendiri. Membangun sikap kritis sebagaimana literasi moral dan etika berperan dalam proses penerimaan informasi dan menciptakan Smart ASN melalui peran e-literasi dan edukasi. Menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab terhadap tugas sebagai ASN tentu tidaklah mudah. Ini akan membutuhkan perencanaan yang matang, dan pemerintah perlu mendukung program tersebut.

Seiring dengan semakin meningkatnya daya saing dan kemajuan teknologi dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hartono (2019), “Ada dua hal yang harus di adopsi dari revolusi teknologi. Pertama adalah membangun

sebuah kerangka open government, yang menitikberatkan pada triangulasi kepentingan para stakeholder termasuk pemerintah, sektor privat untuk program edukasi kebijakan publik, dan masyarakat. Kedua, yaitu dengan membangun *e-government system* di seluruh sektor internal institusi. E-literasi akan membantumeningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu.”Secara teori, seharusnya dengan implementasi E-literasi dan edukasi dapat menciptakan kemampuan inovatif, kreatif, berdaya saing, dan terlaksananya tata kelola pemerintah modern. Namun, kembali lagi pada praktiknya yang harus didukung dari segala aspek dan komponen pemerintahan karena setiap program tentunya akan ada kekurangan dan hambatan sehingga membutuhkan evaluasi yang terus menerus.

Lebih lanjut diungkapkan Hartono (2019) bahwa dalam pendekatan *Human Capital Process* maka e-literasi dan edukasi kebijakan publik harus melalui empat tahapan yaitu, “1) *Acquisition Process* untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi e-literasi dan edukasi kebijakan publik selalu mewakili kompetensi yang dibutuhkan secara profesional; 2) *Development Process*, untuk memastikan bahwa *human asset* yaitu ASN mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh e-literasi dan edukasi kebijakan publik; 3) *Engagement Process* untuk memastikan bahwa ASN memiliki kesempatan besar dalam memperoleh e-literasi dan pemahaman pentingnya implementasi kebijakan publik terutama mereka yang memiliki kinerja tinggi harus memiliki kesempatan untuk memperoleh insentif dari instansi melalui program *Employee Engagement*, dan 4) *Retention Process* untuk memastikan bahwa penghargaan yang telah diberikan mampu mempengaruhi kinerja ASN terus bertahan atau bahkan meningkat.”

Pelaksanaan e-literasi dan edukasi kebijakan publik bertujuan agar ASN dapat menentukan sikap netral dan adil terhadap pelayanan publik. ASN harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta memiliki keyakinan diri atas tanggungjawab yang telah dibebankan guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

Bukan hanya rakyat, partisipasi pemerintah khususnya ASN sangat dibutuhkan guna meningkatkan kontrol publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, nilai dan sikap partisipasi di dalam kelembagaan ataupun instansi pemerintah. Dengan perubahan dalam pola governance, maka partisipasi ASN yang kompeten akan membantu dalam proses perencanaan program pembangunan nasional yang modern.

5. SIMPULAN

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan termasuk dalam peningkatan pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara dituntut untuk meningkatkan kompetensi sebagai individu yang profesional. E-literasi dan edukasi kebijakan publik adalah salah satu strategi peningkatan kompetensi yang menawarkan dampak positif sebagai alternatif meminimalisir anggaran. Dengan kemampuan e-literasi, memudahkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga lebih efisien dan efektif. Sedangkan edukasi kebijakan publik memberikan peran penting

dalam menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap tugas yaitu dalam memberikan pelayanan secara adil dan netral.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking*. Cengage Learning.
- Beers, C. S., Beers, J. W. & Smith, J. O. (2009). *A Principal's Guide to Literacy Instruction*. New York: Guilford Press
- Boyatzis, R. E. (2008). Competencis in The 21st Century. *Journal of management Development*, 27(1). pp. 5-12.
- Boyne, G. A. (2004). Explaining public service performance: Does management matter ?. *Public Policy and Administration*, 19 (4), 100-117.
- Cahyadi, L. D. A., & Surati, D. P. B. S. (2019). The Effect of Competence. Compensation and Organizational Support on Achievement of the Civil State Apparatus in the Regional Revenue Office of West Lombok. *Global Journal of Management and Business Research*.
- Dalimunthe, D. M., & Muda, I. (2014). The application of performance measurement system models using the Malcolm Baldrige Model (MBM) to support Civil State Apparatus Law (ASN) number 5 of 2014 in Indonesia.
- Easton, D. (1965). *A framework for political analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Fitriati, R. (2015). The Institutional Governance in the Strategic Restructuring of Information and Communication Technology Universal Service Obligation to Strengthen National Competitiveness. *Business & Bureaucracy*, 22 (3), 199.
- Hadiana, R. N. (2019). *The Influence Of Transformational Leadership And Commitment Organization Implications For Performance Employee State Civil Apparatus (Asn Bandung Indonesian)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITY OF PASUNDAN).
- Hartono, Bambang D. (2019). SDM aparatur sipil negara juga harus unggul. [Media online; 19 agustus 2019, 09:52]. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/1018958/sdm-aparatur-sipil-negara-juga-harus-unggul>
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi)*. Malang: Intrans Publishing.

Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.

Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: [10.30957/cendekia.v14i1.608](https://doi.org/10.30957/cendekia.v14i1.608).

JISC. 2018. Developing Digital Literacies. *Jisc.ac.uk*.
<https://www.jisc.ac.uk/guides/developing-digital-literacies>

Gani, M. U., Ghani, A., & Nujum, S. (2019). Leadership and Local Culture Influence on State Civil Apparatus (ASN) Job Satisfaction and Performance at Soppeng Regional Organization. *Social Science and Humanities Journal*, 1326-1345.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN). (2018). Tiga Kompetensi Kunci Wajib Dimiliki ASN. *menpan.go.id*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tiga-kompetensi-kunci-wajib-dimiliki-asn>

Lasswel, H., & Kaplan, A. (1950). *Power and society*. New Haven.

McCannon, R., Gleckler, E., & Louchery, M. (2003). Counter-marketing of the mind: media literacy and youth attitudes towards cigarette and alcohol advertising. Programs and Abstracts of The American Public Health Association. San Francisco (CA): APHA.

Martin, Allan. (2008). Digital Literacy and the 'Digital Society' in Lankshear, C and Knobel, M (ed). *Digital literacies: concepts, policies and practices*. Die DeutscheBibliothek.

Meier, K. J., & O'Toole Jr., L. J. (2002). Public management and organizational performance: The effect of managerial quality. *Journal of Policy Analysis and Management: The Journal of the Association for Public Policy Analysis and Management*, 21 (4), 629-643.

Nasution, M. I. (2017). The Influence Of Supervision And Work Discipline On Performance Of State Civil Apparatus. In *Proceeding 3rd Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference 2017* (pp. 5-18).

Nurullah, N. (2019). Pengembangan Kompetesni ASN Penting untuk Pengembangan Profesionalisme Birokrasi. [Media online; 18 juli 2019, 11:23 WIB]. *pikiran-rakyat.com*. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01315558/pengembangan-kompetensi-asn-penting-untuk-profesionalisme-birokrasi>

Nurwanda, A., & Garis, R. R. (2019). Analysis of Performance Appraisal, Talent, Performance of State Civil Apparatus in REalizing Good Government (Analysis on BKDD of Ciamis Regency). *Proceedings of ICOGISS 2019*, 529-535.

Plaksin, S., & Zhulin, A. (2009). Modernizing the State Apparatus: Administrative and State Civil Service Reform. *Problems of Economic Transition*, 51 (11), 79-91.

Apandi. (2020). Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik.

Cendekia (2020), 14(1): 33-42. DOI: [10.30957/cendekia.v14i1.608](https://doi.org/10.30957/cendekia.v14i1.608).

Sarnawa, B. (2018). Legal Friction of State Civil Apparatus Neutrality in Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*, 1 (1), 43-50.

Secker, J. (2004). Electronic resources in the virtual learning environment: a guide for librarians. Available online on [http://eprints.lse.ac.uk/4884/1/Elearning_and_information_literacy_\(LSERO\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/4884/1/Elearning_and_information_literacy_(LSERO).pdf)

Sudrajat, T., Kunarti, S., & Hartini, S. (2019, April). Bridging The Legal Gap Between Open Selection and Internal Selection of State Civil Apparatus Promotion in Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 255, No. 1, p. 012053). IOP Publishing.

Suprpto, S., Pomalingo, N., & Akib, H. (2018, October). Implementation of a culture of discipline for state civil servants (ASN) in Gorontalo District (Study of the Application of the Disciplinary Ambassador Vest). In the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018). Atlantis Press.

Thomas, R. (1987). *Understanding Public Policy*. Englewood Clief, New Jersey Prentice-Hall Inc.

UNESCO. (2005). *Development of information literacy: through school libraries in South East Asia Countries*, Bangkok: UNESCO.

Wilopo, W., & Fitriati, R. (2016). The Institutional Governance in the Strategic Restructuring of Information and Communication Technology Universal Service Obligation to Strengthen National Competitiveness. *Business & Bureaucratic Journal*, 22 (3), 199-220.